

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Teori Sinyal

Teori sinyal dikemukakan pertama kali oleh Spence (1973), yang menjelaskan bagaimana individu di pasar kerja memberi sinyal kemampuan mereka kepada calon pemberi kerja untuk mengurangi asimetri informasi. Dalam konteks ini, pelamar kerja menggunakan kualifikasi pendidikan dan karakteristik (sinyal) lain yang dapat diubah untuk menyampaikan tingkat produktivitas mereka kepada pemberi kerja, yang tidak dapat secara langsung mengamati kemampuan mereka sebelum merekrut. Spence berpendapat bahwa sinyal-sinyal ini membantu pengusaha membentuk penilaian probabilistik mengenai potensi produktivitas pelamar, yang kemudian mempengaruhi keputusan perekrutan dan jumlah gaji yang dapat diterima. Oleh karena itu, proses pemberian sinyal ini menjadi penting dalam mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan alokasi lapangan kerja di pasar kerja (*job market*).

Interpretasi teori sinyal oleh Spence terus mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Untuk konteks penelitian ini, Indriani dan Nurhayati (2022) menginterpretasikan teori Spence (1973) yang menjelaskan bahwa pihak pengirim memberikan sinyal atau isyarat berupa informasi yang menggambarkan keadaan suatu perusahaan yang berguna bagi pihak penerima. Dalam hal ini, sinyal berupa informasi yang dimaksud dapat bersifat langsung, yaitu dengan data berbentuk laporan keuangan yang diberikan oleh manager (Prakoso dan Wahyudi, 2022).

Pada dasarnya, teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal yang dilakukan berguna untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi. *Signalling theory* menjelaskan bahwa terjadi asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak luar, karena pihak manajemen mengetahui lebih banyak informasi mengenai keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan dengan pihak luar, seperti investor (Tillah et al., 2019). Oleh karena itu, ketidakseimbangan informasi yang terjadi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak

prospek dan informasi daripada pihak luar, dalam hal ini investor, membuat perusahaan ingin untuk menyampaikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal (Selviani et al., 2022). Menurut Risanty et al. (2023), “pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaan akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor agar saham perusahaan meningkat.”

Menurut Rahmawati dan Khoiriawati (2022), para investor dipasar modal memerlukan informasi yang relevan, tepat waktu, lengkap, dan akurat untuk mengambil keputusan investasi. Informasi tersebut nantinya akan diinterpretasikan dan dianalisis sebagai kabar baik (*good news*) atau kabar buruk (*bad news*) pada saat diterima. Oleh sebab itu, ketepatan waktu merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan para pengguna laporan keuangan. Menurut Septiani dan Arfianti (2022), “Perusahaan yang mempunyai kabar baik (*good news*) ingin segera menyampaikannya kepada publik, yang diharapkan setelahnya investor tertarik untuk melakukan berinvestasi. Sebaliknya, jika suatu perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangannya, dapat dianggap sebagai sinyal buruk dan publik merasa perusahaan tersebut memiliki berita buruk (*bad news*), yang membuat perusahaan berusaha untuk menunda penyampaian berita buruk tersebut kepada publik.”

## **2.2 Laporan Keuangan**

Berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2022) dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Menurut Kieso et al. (2020), laporan keuangan ditujukan untuk 2 pengguna, yaitu:

1. *Internal users*, yang merupakan pihak di dalam perusahaan yang berfungsi merencanakan, mengorganisir, dan menjalankan bisnis, meliputi pihak manajerial, direktur, supervisi, maupun karyawan.

2. *External users*, yang merupakan pihak di luar perusahaan yang memerlukan informasi keuangan perusahaan, meliputi kreditur, pihak pemerintahan (pajak), maupun investor.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2022) dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, terdapat beberapa tujuan dari laporan keuangan, yaitu:

1. Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi
2. Menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Agar dapat mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:

1. Aset
2. Liabilitas
3. Ekuitas
4. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
5. Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik
6. Arus kas

Menurut IAI Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2022) dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 1, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode
4. Laporan arus kas selama periode
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain

6. laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Menurut IAI dalam Karakteristik Kualitatif Informasi Keuangan Yang Berguna, terdapat dua karakteristik kualitatif yaitu fundamental dan peningkat. Karakteristik kualitatif fundamental terdiri dari:

1. Relevansi

Informasi keuangan yang relevan artinya dapat membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil pengguna. Informasi keuangan mampu membuat perbedaan dalam keputusan jika memiliki nilai prediktif, nilai konfirmasi, atau keduanya. Informasi keuangan memiliki nilai prediktif jika informasi tersebut dapat digunakan sebagai masukan yang digunakan oleh pengguna untuk memprediksi hasil di masa depan. Informasi keuangan memiliki nilai konfirmasi jika menyediakan masukan (konfirmasi atau perubahan) tentang evaluasi sebelumnya.

2. Representasi Tepat

Laporan keuangan merepresentasikan fenomena ekonomi dalam kata dan angka. Agar dapat menjadi informasi yang berguna, informasi keuangan harus merepresentasikan fenomena yang relevan dan harus merepresentasikan secara tepat fenomena yang akan direpresentasikan. Terdapat tiga karakteristik yang harus dimiliki untuk dapat menunjukkan representasi secara tepat dengan sempurna, yaitu lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan.

Karakteristik kualitatif peningkat terdiri dari:

1. Keterbandingan

Keterbandingan merupakan karakteristik kualitatif yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami persamaan dan perbedaan antara pos-pos. Berbeda dengan karakteristik kualitatif lainnya,

keterbandingan tidak berhubungan dengan satu pos, karena perbandingan mensyaratkan paling tidak dua pos.

2. Keterverifikasian

Keterverifikasian dapat membantu meyakinkan pengguna bahwa informasi merepresentasikan fenomena ekonomi secara tepat sebagaimana mestinya. Keterverifikasian artinya berbagai pengamat independen dengan pengetahuan berbeda-beda dapat mencapai konsensus, meskipun tidak selalu mencapai kesepakatan, bahwa penggambaran tertentu merupakan representasi tepat.

3. Ketepatanwaktuan

Ketepatanwaktuan berarti bahwa informasi tersedia bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka, karena umumnya, semakin lawas suatu informasi maka informasi tersebut menjadi makin kurang berguna.

4. Keterpahaman

Keterpahaman artinya pengklasifikasian, pengarakteristikan dan penyajian informasi diberikan secara jelas dan ringkas sehingga informasi dapat membuat informasi tersebut mudah dipahami.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik Pasal 2, emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan laporan keuangan berkala kepada masyarakat. Penyampaian laporan keuangan berkala tersebut wajib dilakukan melalui sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, lebih detail dalam ayat 3, Laporan keuangan berkala yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib memuat informasi yang sama dengan Laporan Keuangan Berkala yang diumumkan kepada masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2022).

### **2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

Menurut Rahmawati & Khoiriawati (2022), ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan jangka waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangan auditannya kepada publik melalui Bapepam-LK, yang saat ini berubah menjadi OJK. “Ketepatan waktu merupakan suatu pemanfaatan informasi oleh pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas atau kemampuannya untuk mengambil keputusan. Ketepatan waktu dalam penyampaian informasi sangat penting bagi tingkat manfaat dan nilai sebuah laporan keuangan” (Risanty et al., 2023).

Ketepatan waktu pelaporan keuangan menurut Chambers dan Penman (1984) dalam Diliasmara dan Nadirsyah (2019) ditentukan dalam dua cara. Cara pertama mendefinisikan ketepatan waktu sebagai keterlambatan waktu dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan, sedangkan cara kedua menghitung ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan yang relatif atas tanggal pelaporan yang diharapkan. Di sisi lain, Septiani dan Arfianti (2022) menjelaskan bahwa tepat waktu atau tidaknya penyampaian laporan keuangan perusahaan dapat dilihat dari waktu publikasinya, apakah kurang atau lebih dari 120 hari (batas waktu yang telah ditetapkan OJK).

Menurut Septiana (2023), ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan merupakan indikator dari relevansi laporan keuangan, karena relevansi berkaitan erat dengan ketepatan waktu laporan keuangan. “Manfaat dari laporan keuangan suatu perusahaan tergantung pada keakuratannya dan ketepatan waktunya. Informasi yang relevan akan bermanfaat bagi para pemakai apabila tersedia tepat waktu sebelum pemakai kehilangan kesempatan atau kemampuan untuk memengaruhi keputusan yang diambil” Purba (2020). Kedua hal tersebut sejalan dengan pendapat Rahmawati dan Khoiriawati (2022) yang mengatakan bahwa “Laporan keuangan yang disampaikan tepat pada waktunya tentu relevansi dari informasi yang disediakan akan dapat memberi peningkatan kapasitasnya guna memberi pengaruh akan keputusan serta keterlambatan penyampaian laporan keuangan bisa mengurangi informasi atas kegunaannya”.

Ketentuan mengenai waktu penyampaian laporan keuangan sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik Pasal 4 yang berbunyi “Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.” (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Perusahaan yang melanggar ketentuan, dalam hal ini melakukan keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangannya, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai pasal 25 ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022, berupa:

1. Peringatan tertulis
2. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
3. Pembatasan kegiatan usaha
4. Pembekuan kegiatan usaha
5. Pencabutan izin usaha
6. Pembatalan persetujuan
7. Pembatalan pendaftaran
8. Pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran
9. Pencabutan izin orang perseorangan

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dihitung dengan variabel *dummy*, dengan arti:

Kode 1: perusahaan yang tepat waktu menyampaikan laporan keuangannya

Kode 0: perusahaan yang tidak tepat waktu/terlambat menyampaikan laporan keuangannya

Untuk laporan keuangan tahun 2020, dikatakan tepat waktu jika perusahaan menyampaikan laporan keuangannya selambat-lambatnya akhir bulan ketiga dan diperpanjang selama dua bulan dari batas waktu yang sudah ditentukan (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2021). Untuk laporan keuangan tahun 2021,

dikatakan tepat waktu jika perusahaan menyampaikan laporan keuangannya selambat-lambatnya akhir bulan ketiga dan diperpanjang selama satu bulan dari batas waktu yang sudah ditentukan (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2022). Untuk laporan keuangan tahun 2022, dikatakan tepat waktu jika perusahaan menyampaikan laporan keuangannya selambat-lambatnya akhir bulan ketiga setelah laporan keuangan tahunan dibuat (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2023). Sebaliknya, akan dikatakan tidak tepat waktu jika perusahaan menyampaikan laporan keuangannya melewati batas waktu pengumpulan maupun perpanjangan yang sudah ditentukan. Hal ini sesuai dengan keputusan Otoritas Jasa Keuangan terkait Pelonggaran Batas Waktu Laporan Keuangan dan RUPS untuk melakukan penyesuaian dengan kondisi darurat pada Pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

Dalam menyampaikan laporan keuangannya kepada BEI, perusahaan tercatat diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan dengan format yang terstandarisasi, yaitu dengan format *Extensible Business Reporting Language (XBRL)* (Bursa Efek Indonesia, 2021). Selain itu, perusahaan tercatat juga diwajibkan melakukan pelaporan dalam bentuk *softcopy* melalui laman *IDXnet*. Pelaporan melalui *softcopy* dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan tercatat, serta untuk memenuhi penyebaran informasi yang cepat, akurat, dan merata bagi para pengguna laporan keuangannya (Bursa Efek Indonesia, 2021).

*IDX e-reporting* yang selanjutnya disingkat menjadi *IDXnet* merupakan “sistem pelaporan elektronik untuk kegiatan penyampaian pelaporan dan keterbukaan informasi oleh Perusahaan Tercatat dan kegiatan pemantauan oleh Bursa, termasuk komunikasi elektronik yang dapat dilakukan oleh Bursa kepada Perusahaan Tercatat.” (Indonesia Stock Exchange, 2019). Terdapat beberapa fungsi dari *IDXnet* (Indonesia Stock Exchange, 2019), yaitu:

1. Sarana penyampaian dan pengumuman pelaporan elektronik oleh perusahaan tercatat kepada Bursa dengan lebih cepat



2. Sarana untuk mempermudah perusahaan tercatat dalam memantau informasi yang telah diberikan kepada Bursa, baik informasi terkini maupun historikal.
3. Sarana untuk mempermudah Bursa melakukan *monitoring* atas pelaporan yang diberikan oleh perusahaan tercatat secara lebih cepat
4. Sarana bagi Bursa untuk menyampaikan surat secara elektronik kepada perusahaan tercatat

Terkait penggunaan *IDXnet* sendiri, berdasarkan surat edaran Bursa Efek Indonesia Nomor SE-00006/BEI/10-2019 terkait Tata Cara Penyampaian Laporan Secara Elektronik Oleh Perusahaan Tercatat (Indonesia Stock Exchange, 2019), perusahaan tercatat wajib untuk:

1. “menyediakan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*) dan jaringan komunikasi yang memadai untuk digunakan dalam penerapan pelaporan elektronik dengan *IDXnet*.”
2. “menyampaikan pemberitahuan kepada Bursa mengenai rencana penggunaan *IDXnet* termasuk penunjukan 1 (satu) orang anggota direksi atau sekretaris perusahaan yang akan bertindak sebagai wakil Perusahaan Tercatat dalam penerapan *IDXnet*.”
3. “mengirimkan paling kurang 1 (satu) orang anggota direksi atau sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b. di atas guna mengikuti pelatihan penggunaan *IDXnet* yang diselenggarakan oleh Bursa.”
4. “Bursa memberikan *user id* dan *password* kepada Perusahaan Tercatat untuk digunakan oleh wakil Perusahaan Tercatat dalam penerapan *IDXnet* paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa setelah tanggal Pencatatan.”
5. “Perusahaan Tercatat yang telah mendapatkan *user id* dan *password* sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas, wajib menyampaikan laporan dan informasi kepada Bursa melalui *IDXnet*.”
6. “Perusahaan Tercatat bertanggung jawab sepenuhnya atas informasi yang disampaikan oleh wakil yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b. di atas dalam penyampaian pelaporan melalui *IDXnet*, termasuk

atas kekeliruan informasi atau kesalahan penggunaan sistem tersebut, jika ada.

7. “Laporan dan informasi yang disampaikan oleh Perusahaan Tercatat kepada publik melalui *IDXnet* adalah seluruh laporan dan informasi yang tidak bersifat rahasia dan bersifat final.”
8. “Laporan dan informasi yang disampaikan oleh Perusahaan Tercatat melalui *IDXnet* yang merupakan jawaban atas permintaan penjelasan yang diminta oleh Bursa adalah laporan dan informasi yang:
  - a. bersifat final dan bersifat rahasia yang hanya disampaikan kepada Bursa; atau
  - b. bersifat final dan tidak bersifat rahasia yang diumumkan kepada publik.”
9. “Perusahaan Tercatat menyampaikan laporan, informasi dan/atau tanggapan atas permintaan penjelasan yang diminta oleh Bursa dengan mengisi formulir yang terdapat dalam *IDXnet* sesuai dengan jenis laporan dan informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Edaran secara benar dan lengkap.”
10. “Khusus untuk penyampaian laporan keuangan wajib dilakukan menggunakan format *Extensible Business Reporting Language (XBRL)* sesuai formulir yang terdapat di *IDXnet* dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penyampaian laporan keuangan berbasis *XBRL* disampaikan oleh Perusahaan Tercatat menggunakan taksonomi laporan keuangan yang aktif pada saat pelaporan dilakukan.
  - b. Bursa dapat mengubah taksonomi laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.”
11. “Dalam hal Perusahaan Tercatat mengisi formulir yang terdapat dalam *IDXnet* tidak sesuai dengan jenis laporan dan informasinya, maka Perusahaan Tercatat dianggap belum memenuhi kewajiban penyampaian atas keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.1.2. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (Lampiran

- 1 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004).”
12. “Bursa dapat menerapkan ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi (Lampiran 1 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-307/BEJ/07- 2004 tanggal 19 Juli 2004), apabila Perusahaan Tercatat tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 10 di atas.”
  13. “Pelaporan melalui *IDXnet* dianggap telah diterima Bursa apabila Perusahaan Tercatat telah menerima konfirmasi dalam bentuk notifikasi pada aplikasi dan atau e-mail.”
  14. “Setiap laporan yang diterima oleh Bursa dari Perusahaan Tercatat melalui *IDXnet* dianggap sebagai laporan Perusahaan Tercatat yang sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan VI.1.2. Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004).”
  15. “Dalam hal terdapat lampiran atas laporan yang disampaikan Perusahaan Tercatat kepada Bursa melalui *IDXnet* maka lampiran tersebut merupakan konversi dari dokumen dalam bentuk asli tercetak (*hard copy*).”
  16. “Laporan dan informasi yang telah disampaikan oleh Perusahaan Tercatat melalui *IDXnet* wajib didokumentasikan secara *hard copy* oleh Perusahaan Tercatat. Dalam kondisi tertentu antara lain untuk keperluan evaluasi, pemantauan dan bukti hukum, Bursa dapat meminta kepada Perusahaan Tercatat untuk mengirimkan laporan dan informasi tersebut di atas dalam bentuk *hard copy* yang telah ditandatangani oleh wakil yang telah ditunjuk oleh Perusahaan Tercatat paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa terhitung sejak tanggal surat Bursa.”
  17. “Dalam hal terdapat perbedaan data dan/atau informasi dan/atau penafsiran antara *hard copy* dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui *IDXnet* maka yang berlaku adalah laporan dalam bentuk *hard copy*.”

18. “Terkait dengan ketentuan angka 16 di atas, Perusahaan Tercatat wajib mengumumkan kembali informasi sebagaimana termuat dalam dokumen *hard copy* tersebut melalui *IDXnet*.”
19. “Dalam hal mengalami *IDXnet* gangguan, maka penyampaian pelaporan dalam bentuk elektronik dapat dilakukan melalui e-mail atau bentuk elektronik lainnya sesuai dengan pengumuman Bursa.”

#### **2.4 Profitabilitas (*Return on Assets*)**

“*Financial performance is a complete evaluation of a company’s overall standing in categories such as assets, liabilities, equity, expenses, revenue, and overall profitability. It is measured through various business-related formulas that allow users to calculate exact details regarding a company’s potential effectiveness*” (Schmidt, 2023). Dalam Bahasa Indonesia, dapat diartikan bahwa kinerja keuangan merupakan evaluasi pada perusahaan secara menyeluruh pada posisi keseluruhan perusahaan, mulai dari aset, liabilitas, ekuitas, beban, pendapatan, dan keseluruhan profitabilitas. Kinerja keuangan dapat diukur melalui berbagai formula terkait bisnis yang memungkinkan penggunaannya untuk menghitung detail yang tepat mengenai potensi efektivitas perusahaan. “Potret dari performa manajemen dalam pengelolaan perusahaan tidak lain adalah profitabilitas” (Ardini dan Sapari, 2022).

“Rasio profitabilitas mengukur pendapatan atau keberhasilan operasi perusahaan untuk periode waktu tertentu. Pendapatan atau kerugian, memengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh pembiayaan utang dan ekuitas. Hal tersebut juga memengaruhi posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk berkembang. Akibatnya, baik kreditor maupun investor tertarik untuk mengevaluasi kekuatan menghasilkan profitabilitas” (Weygandt et al., 2019). Menurut Diliasmara dan Nadirsyah (2019), “Profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi perusahaannya”.

Menurut Weygandt et al. (2019), terdapat beberapa rasio profitabilitas yang dapat dijadikan pengukuran, yaitu:

1. “*Profit margin*, digunakan untuk mengukur persentase setiap pendapatan yang menghasilkan laba bersih perusahaan. Rasio ini dihitung dengan membagi *net income* dengan *net sales*”.
2. “*Return on Assets*, merupakan ukuran profitabilitas secara keseluruhan. Rasio ini dapat dihitung dengan membagi *net income* dengan *average total assets*”.
3. “*Asset turnover*, digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio ini dapat dihitung dengan membagi *net sales* dengan *average total assets*”.
4. “*Return on ordinary shareholders equity*, digunakan untuk mengukur profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan besarnya *net income* yang diperoleh perusahaan untuk setiap uang yang diinvestasikan oleh pemilik. Ini dapat dihitung dengan membagi *net income available to ordinary shareholders* dengan *ordinary shareholders' equity*”.
5. “*Earnings per Share (EPS)* merupakan rasio yang mengukur *net income* yang diperoleh dari setiap saham biasa. Rasio ini dihitung dengan membagi *net income available to ordinary shareholders* dengan *weighted-average ordinary shares outstanding* selama tahun berjalan”.
6. “*Price-Earnings (P-E) ratio* mencerminkan penilaian investor atas pendapatan masa depan perusahaan. Rasio ini dihitung dengan membagi *market price per share* dengan *earnings per share*”.
7. “*Payout ratio*, mengukur persentase pendapatan yang dibagikan dalam bentuk dividen tunai. Rasio ini dihitung dengan membagi *cash dividend declared on ordinary shares* dengan *net income*”.

Profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Return on Assets (ROA)*. Menurut Kieso et al. (2020), *Return on Assets* adalah rasio yang mengukur tingkat pengembalian yang dihasilkan perusahaan menggunakan aset yang dimiliki. “*Return on Assets (ROA)* merupakan salah satu bentuk rasio profitabilitas yang

dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana yang ditanamkan dalam kegiatan operasi perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan” (Septiana, 2023).

Berikut merupakan rumus *ROA* menurut Kieso et al. (2020):

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Average Total Assets}} \quad (2.1)$$

Keterangan:

*Net income*: laba bersih tahun berjalan

*Average total assets*: rata-rata total aset perusahaan

Komponen pertama dari *Return on Assets (ROA)* adalah *net income*/laba bersih. Menurut Ardhiyanto (2019), laba merupakan jumlah residual yang tertinggal setelah semua beban dikurangkan pada penghasilan. Dalam Kieso et al. (2020), *net income* / laba bersih berasal dari perhitungan pendapatan, beban, dan transaksi yang menyebabkan keuntungan ataupun kerugian, dan hal tersebut diringkas dan dilaporkan dalam *income statement* / laporan laba rugi. “Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan hasil usaha perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Perhitungan laba rugi (*income statement*) digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu” (Ardhiyanto, 2019). Menurut Kieso et al. (2020), *income statement* / laporan laba rugi terdiri dari beberapa komponen, yakni:

1. Bagian pendapatan dan penghasilan (*Sales or revenue section*) menyajikan “pendapatan (*sales*), diskon, potongan harga, retur, dan informasi terkait lainnya, tujuannya adalah untuk mencapai jumlah bersih dari *sales revenue*”.
2. Bagian harga pokok pendapatan (*cost of goods sold section*) menunjukkan “harga pokok pendapatan untuk menghasilkan pendapatan (*sales*)”.
3. Laba kotor (*gross profit*) menunjukkan “pendapatan dikurangi harga pokok pendapatan”.

4. Beban pendapatan (*selling expenses*) mencakup “pengeluaran yang dihasilkan dari usaha perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, seperti beban gaji, beban pengiriman, beban perlengkapan, dan beban iklan”.
5. Beban administrasi atau umum (*administrative or general expenses*) “mencakup biaya administrasi umum, seperti biaya asuransi dan beban depresiasi”.
6. Pendapatan dan beban lainnya (*other income and expenses*) mencakup “sebagian besar transaksi lain yang tidak sesuai dengan kategori pendapatan dan pengeluaran yang disediakan di atas. Pos-pos seperti keuntungan dan kerugian pendapatan aset berumur panjang, penurunan nilai aset, dan biaya restrukturisasi dilaporkan dalam bagian ini. Terdapat juga pendapatan seperti pendapatan sewa, pendapatan dividen, dan pendapatan bunga yang dilaporkan”.
7. Pendapatan dari operasi (*income from operations*) yang merupakan “pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas normal perusahaan. Didapat dengan mengurangi *gross profit* dengan beban pendapatan, beban administrasi atau umum, dan ditambah dengan pendapatan lainnya atau dikurangi dengan beban lainnya.
8. Biaya pembiayaan (*financing costs*) yang merupakan “bagian terpisah yang mengidentifikasi biaya pembiayaan perusahaan, disebut sebagai beban bunga”.
9. Penghasilan sebelum pajak penghasilan (*income before income tax*) Total penghasilan sebelum pajak penghasilan dihitung dengan cara *income from operations* dikurangkan dengan *financing cost*.
10. Pajak penghasilan (*income tax*) merupakan “Bagian singkat pelaporan pajak yang dikenakan atas penghasilan sebelum pajak penghasilan”.
11. Pendapatan dari operasi berkelanjutan (*income from continuing operations*) merupakan “hasil perusahaan sebelum keuntungan atau kerugian apa pun dari operasi yang dihentikan. Jika perusahaan tidak memiliki keuntungan atau kerugian pada operasi yang dihentikan, bagian ini tidak dilaporkan dan jumlah ini dilaporkan sebagai laba bersih”.

12. Operasi yang dihentikan (*discontinued operations*) yang berisi “keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari disposisi komponen perusahaan”.
13. Pendapatan bersih (*net income*) yang merupakan “hasil bersih dari kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu”.
14. *Non-controlling interest*, yang menyajikan “alokasi laba bersih yang ditujukan kepada pemegang saham pengendali dan kepentingan non-pengendali”.
15. *Earnings per share*, “Laba yang diperoleh dari setiap saham biasa yang dilaporkan”.

Komponen kedua dari *Return on Assets (ROA)* adalah *average total asset*. Aset merupakan salah satu komponen dalam laporan keuangan selain liabilitas dan ekuitas. “*Asset is a present economic resource controlled by the entity as a result of past events (an economic resource is a right that has the potential to produce economic benefits)*” (Kieso et al., 2022). Dalam Bahasa Indonesia, aset merupakan sumber daya ekonomi di masa sekarang yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dengan sumber daya ekonomi yang memiliki arti sebagai hak yang berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi. “Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan menggunakan asetnya untuk melakukan aktivitas seperti produksi dan penjualan. Ciri umum yang dimiliki oleh semua aset adalah kemampuan untuk memberikan layanan atau manfaat di masa depan. Dalam kegiatan bisnis, layanan atau manfaat di masa depan tersebut pada akhirnya menghasilkan arus kas masuk (penerimaan)” (Weygandt et al., 2019).

Aset disubklasifikasikan menjadi dua, yaitu *current asset* dan *non-current asset*. “Aset lancar / *current asset* adalah kas dan aset lain yang diharapkan dapat diubah oleh perusahaan menjadi uang tunai, dapat dijual, atau dapat dikonsumsi baik dalam satu tahun atau dalam siklus operasi. Di sisi lain, *non-current asset* merupakan aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar / *current asset*” (Kieso et al., 2022). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK 16, aset tetap merupakan “aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan



diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020b).

Terdapat beberapa komponen dari aset lancar menurut Kieso et al. (2020), yakni:

1. Persediaan (*inventory*)
2. Piutang (*receivables*)
3. Beban dibayar dimuka (*prepaid expenses*)
4. Investasi jangka pendek (*short-term investments*)
5. Kas (*Cash*)

Di sisi lain, terdapat beberapa komponen aset tidak lancar / non-current asset (Kieso et al., 2022), yakni:

1. Investasi jangka panjang (*long-term investments*)  
“mencakup setidaknya salah satu dari 4 jenis, yaitu investasi dalam sekuritas (seperti obligasi, saham), investasi dalam aset berwujud yang saat ini tidak digunakan untuk operasional (seperti tanah yang dimiliki untuk spekulasi), investasi yang disisihkan dalam dana khusus (seperti *sinking fund*, dana pensiun), dan penyertaan pada anak perusahaan atau perusahaan asosiasi yang tidak dikonsolidasi”.
2. *Property, plant, and equipment*  
“merupakan aset berwujud yang memiliki umur panjang dan digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan bisnis. Aset ini terdiri dari properti fisik seperti tanah, bangunan, mesin, perabot, peralatan, dan pemborosan sumber daya (mineral). Dengan pengecualian pada tanah, perusahaan akan melakukan depresiasi (misalnya bangunan) atau melakukan depleksi (misalnya cadangan minyak) pada aset ini”.
3. Aset tidak berwujud (*intangible assets*)  
“merupakan aset yang memiliki kekurangan substansi fisik dan bukan instrumen keuangan. Aset yang dapat diidentifikasi termasuk paten, hak cipta, waralaba, merek dagang, nama dagang, dan daftar pelanggan. Perusahaan melakukan penghapusan (amortisasi) pada aset tidak berwujud

dengan umur yang terbatas selama umur hukum yang lebih rendah atau umur manfaatnya”.

4. Aset lainnya (*other assets*)

“item yang termasuk dalam bagian “aset lainnya” sangat bervariasi dalam praktiknya, seperti biaya dibayar di muka jangka panjang dan piutang tidak lancar. Item lain yang mungkin disertakan adalah aset dalam dana khusus, properti yang dimiliki untuk dijual, dan uang tunai atau sekuritas yang dibatasi”.

## **2.5 Pengaruh Profitabilitas (ROA) Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

Menurut Zebua et al. (2020), “profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang diperoleh oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Profitabilitas perusahaan yang tinggi akan mencerminkan prospek perusahaan yang baik. Semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka akan mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan yang tinggi juga, sehingga terlihat kinerja perusahaan yang baik”. Teori kepatuhan menyatakan tingginya profitabilitas perusahaan, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik, terbukti dari laba yang dihasilkan, sehingga perusahaan akan semakin patuh untuk menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu.(Videsia et al., 2022).

“Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dapat dikatakan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut mengandung berita baik dan perusahaan yang mengalami berita baik akan cenderung menyerahkan laporan keuangannya tepat waktu (Purba, 2020). Menurut Diliasmara dan Nadirsyah (2019), “perusahaan yang memperoleh laba cenderung menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu, sebaliknya perusahaan yang mengalami kerugian cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya”. Diliasmara dan Nadirsyah (2019) berpendapat bahwa perusahaan yang mengalami kerugian cenderung membutuhkan auditor dalam memulai proses audit yang lebih lambat

dari biasanya, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan keterlambatan penyampaian kabar buruk kepada publik.

Hasil penelitian dari Diliasmara dan Nadirsyah (2019), Purba (2020), Rahmawati dan Khoiriawati, (2022), dan Septiana (2023) menunjukkan bahwa “*ROA* berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Videsia et al. (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas yang diukur dengan *ROA* berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka dapat dibentuk hipotesis alternatif penelitian mengenai pengaruh profitabilitas (*ROA*) terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

Ha<sub>1</sub>: Profitabilitas yang diukur dengan *ROA* berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

## **2.6 Leverage (Debt to Equity Ratio)**

“Rasio-rasio keuangan memperlihatkan gambaran kondisi perusahaan dalam bidang keuangan. Jika perusahaan sedang dalam kondisi yang tidak baik maka pihak manajemen biasanya berusaha untuk menutupi berita buruk tersebut” (Diliasmara dan Nadirsyah, 2019). Menurut Suoth et al. (2022), “Selain profitabilitas, informasi lain yang bisa didapatkan dalam laporan keuangan yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola hutangnya dalam rangka untuk memperbesar bisnis dan meningkatkan keuntungan perusahaan dan juga untuk melunasi kembali hutang tersebut”. Diliasmara dan Nadirsyah (2019) berpendapat bahwa “*leverage ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang apabila perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan. Rasio ini menunjukkan seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh pihak luar atau kreditur”. Menurut Carolina dan Tobing (2019), rasio solvabilitas dapat disebut sebagai rasio *leverage*.

Terdapat beberapa rasio solvabilitas atau *leverage*, yakni:

1. Rasio *Debt to asset*, “berfungsi mengukur persentase total aset yang disediakan kreditur. *DTA* dihitung dengan membagi total liabilitas (baik liabilitas lancar dan tidak lancar) dengan total aset. Rasio ini menunjukkan tingkat *leverage* suatu perusahaan.” (Weygandt et al., 2019)
2. Rasio *Time interest earned*, yang merupakan “waktu bunga yang diperoleh yang memberikan indikasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga saat jatuh tempo. *Time interest earned* dihitung dengan membagi total pendapatan bersih, beban bunga, dan pajak penghasilan dengan beban bunga.” (Weygandt et al., 2019)
3. Rasio *Debt to equity*, yaitu “rasio utang yang mempengaruhi ekuitas suatu bisnis. Tujuan dari menghitung debt to equity ratio ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar utang perusahaan yang diperoleh perusahaan mempengaruhi ekuitas yang ada pada perusahaan tersebut.” (Septiana, 2023)
4. Rasio *Tangible asset debt coverage*, merupakan “jenis terakhir dalam rasio solvabilitas. Rasio ini akan digunakan untuk mengetahui perbandingan antara utang jangka panjang yang ditanggung perusahaan dengan aktiva tetap berwujud.” (Septiana, 2023)

Menurut Rahmawati dan Khoiriawati (2022), “tingkat *leverage* keuangan suatu perusahaan dapat diukur menggunakan debt equity ratio (*DER*)”, sehingga *leverage* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Debt to equity (DER)*. *DER* menurut Parhusip dan Pasaribu, (2022) adalah “rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara total utang dengan modal. Rasio ini digunakan untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan”.

Berikut merupakan rumus dari perhitungan *DER* menurut Septiana (2023):

$$\boxed{\text{Debt to equity} = \frac{\text{Total liabilitas}}{\text{Ekuitas}}} \quad (2.2)$$

Keterangan:

Total liabilitas = total utang

Ekuitas = total ekuitas

Komponen pertama dari *DER* adalah liabilitas. Menurut IAI dalam PSAK 1 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020a), liabilitas merupakan kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik. “Kewajiban adalah klaim dari kreditur atas total aset, sedangkan ekuitas adalah klaim dari kepemilikan atas total aset” (Weygandt et al., 2019).

Weygandt et al. (2019) membagi liabilitas menjadi 2 bagian, yaitu *current liabilities* dan *non-current liabilities*. *Current liabilities* / kewajiban lancar merupakan “hutang yang diharapkan dapat dibayar oleh perusahaan dalam jangka waktu satu atau dua tahun siklus operasi, mana yang lebih lama. Utang yang tidak memenuhi kriteria ini akan berada dalam kategori kewajiban tidak lancar. Contoh dari kewajiban lancar adalah utang dagang, utang gaji dan upah, utang wesel, utang bunga, dan pendapatan pajak harus dibayar”. Beberapa komponen dari *current liabilities* menurut (Weygandt et al., 2019) adalah:

1. *Notes payable* / wesel bayar, yang berarti “perusahaan mencatat kewajiban dalam bentuk catatan tertulis sebagai wesel bayar. Wesel bayar sering digunakan sebagai pengganti hutang dagang / *accounts payable* karena mereka memberikan bukti formal kewajiban kepada pemberi pinjaman dalam hal upaya hukum yang diperlukan untuk menagih utang”.
2. *Value-added tax payable* / pajak pertambahan nilai, yang berarti “Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak konsumsi. Pajak ini dikenakan pada produk atau layanan setiap kali nilai ditambahkan pada suatu tahap produksi dan penjualan akhir. PPN merupakan biaya bagi konsumen akhir, biasanya individu pribadi”.

3. *Sales tax payable* / pajak penjualan, yang berarti “perusahaan tidak menganggap pajak penjualan sebagai beban, karena ketika perusahaan mengirimkan pajak ke agen perpajakan, akun hutang pajak penjualan akan didebit dan kas akan berkurang di sisi kredit. Perusahaan hanya berfungsi meneruskan ke pemerintah jumlah pajak yang dibayarkan oleh pelanggan”.
4. *Unearned revenue* / pendapatan diterima dimuka, yang berarti “*unearned revenue* terjadi ketika perusahaan menerima uang tunai sebelum sesuatu dilakukan, maka liabilitas akan dicatat dengan mengkredit akun pendapatan diterima di muka. Artinya, sebuah perusahaan sekarang memiliki kewajiban kinerja (kewajiban) untuk memberikan sesuatu kepada salah satu pelanggannya”.
5. *Salaries and wages* / gaji dan upah/tunjangan, yang berarti “ perusahaan akan melaporkan kewajiban lancar dari jumlah gaji atau upah yang terhutang kepada karyawan di akhir periode akuntansi. Perusahaan juga melaporkan hal-hal seperti bonus sebagai kewajiban lancar”.
6. *Current Maturities of Long-Term Debt* / hutang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini, yang berarti “perusahaan seringkali memiliki sebagian dari hutang jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Jumlah yang terutang tersebut dianggap sebagai kewajiban lancar”.

“Liabilitas tidak lancar adalah kewajiban yang diharapkan akan dibayar oleh perusahaan setelah satu tahun. Kewajiban dalam kategori ini meliputi hutang obligasi, hutang hipotik, wesel bayar jangka panjang, hutang sewa, dan kewajiban pensiun”(Weygandt et al., 2019). Terdapat 3 jenis *non-current liabilities* / kewajiban tidak lancar menurut Weygandt et al. (2019), yakni:

1. “Kewajiban yang timbul dari situasi pembiayaan spesifik, misalnya penerbitan obligasi, *notes payable* jangka panjang, dan kewajiban sewa guna usaha”.

2. “Kewajiban yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan, misalnya kewajiban pajak / *pension liabilities* dan kewajiban pajak penghasilan tangguhan / *deferred income tax liabilities*”.
3. “Kewajiban yang bergantung pada kejadian atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa masa depan untuk mengkonfirmasi jumlah yang harus dibayar, penerima pembayaran, atau tanggal yang harus dibayar, misalnya garansi, jaminan layanan atau produk, kewajiban lingkungan, dan restrukturisasi”.

Komponen kedua dari *DER* adalah ekuitas. Menurut IAI dalam PSAK 1 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020a), ekuitas merupakan residual atas aset entitas setelah dikurangi dengan semua liabilitas. Ekuitas menurut Weygandt et al. (2019) merupakan klaim dari kepemilikan atas total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kieso et al. (2020) mengatakan bahwa ekuitas didapat dari sisa aset entitas yang tersisa setelah dikurangi dengan semua kewajibannya.

Kieso et al. (2020) membagi ekuitas menjadi 6 komponen, yaitu:

1. *Share capital*, merupakan “nilai par atau nilai yang dinyatakan dari saham yang diterbitkan. *Share capital* termasuk saham biasa dan saham preferen”.
2. *Share premium*, merupakan “selisih lebih dari jumlah yang dibayarkan di atas nilai par atau nilai yang dinyatakan dari saham yang diterbitkan”.
3. *Retained earnings*, merupakan “laba perusahaan yang ditahan dan tidak dibagikan”.
4. *Accumulated other comprehensive income*, merupakan “jumlah agregat dari penghasilan komprehensif lainnya”.
5. *Treasury shares*, merupakan “besaran dari saham biasa yang dibeli / ditarik kembali dari peredaran”.
6. *Non-controlling interest*, merupakan “bagian ekuitas dari anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh pengendali”.

## 2.7 Pengaruh *Leverage (DER)* Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Menurut Rahmawati (2023), “rasio *leverage* menggambarkan tingginya tingkat risiko keuangan pada suatu perusahaan, karena tingginya risiko keuangan yang tinggi mengindikasikan atau memberi sinyal bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan pada aspek keuangannya”. “Tingginya resiko keuangan perusahaan akan tercerminkan apabila *debt to equity ratio* perusahaan tersebut tinggi. Sebuah perusahaan dengan resiko keuangan yang tinggi diindikasikan sebagai perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan (*financial distress*) yang diakibatkan kewajiban yang tinggi. Kesulitan keuangan pada perusahaan ialah berita buruk yang bisa memberi pengaruh pada keadaan perusahaan dimata publik” (Rahmawati & Khoiriawati, 2022).

Dilasmara dan Nadirsyah (2019) menyatakan bahwa “pihak manajemen cenderung akan menunda penyampaian laporan keuangan yang berisi berita buruk. Perusahaan dengan kondisi *DER* yang tinggi akan terlambat dalam penyampaian pelaporan keuangannya, karena waktu yang ada akan digunakan untuk menekan *DER* serendahrendahnya”. Hal ini membuat perusahaan dengan tingkat *leverage* yang rendah mengindikasikan kabar baik bagi perusahaan, yang membuat perusahaan cenderung tidak mau menunda menyampaikan laporan keuangannya (Suoth et al., 2022). Di sisi lain, perusahaan dengan *leverage* yang tinggi tetap dapat menyampaikan laporan keuanganya secara tepat waktu. Suoth et al. (2022).

Hasil penelitian dari Agustina dan Rahmawati (2023), Aqsa et al. (2020), Parhusip dan Pasaribu (2022), dan Rahmawati dan Khoiriawati (2022) menunjukkan bahwa “*leverage (DER)* berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, baik itu secara parsial maupun secara simultan. Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka dapat dibentuk hipotesis alternatif penelitian mengenai pengaruh *leverage (DER)* terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang dapat dinyatakan sebagai berikut:



Ha<sub>2</sub>: *Leverage* yang diukur dengan *DER* berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

## 2.8 Opini Audit

Menurut Risanty et al. (2023), opini audit merupakan “pernyataan dari auditor tentang prinsip materialitas pada laporan keuangan suatu perusahaan yang wajar atas kecocokan pembuatan *financial statement* suatu perusahaan melalui penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum”. Berdasarkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Audit (SA) 2021 ([www.iapi.or.id](http://www.iapi.or.id)), auditor bertujuan untuk “merumuskan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan suatu evaluasi atas kesimpulan yang ditarik dari bukti audit yang diperoleh dan untuk menyatakan suatu opini secara jelas melalui suatu laporan tertulis”. Standar Audit (SA) (2021) menyatakan bahwa “auditor harus merumuskan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku”. Terdapat 2 bentuk opini audit menurut Standar Audit (SA) 2021 ([www.iapi.or.id](http://www.iapi.or.id)), yakni:

### 1. Opini Tanpa Modifikasian

“Auditor harus menyatakan opini tanpa modifikasian ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.” Opini tanpa modifikasian sendiri berbentuk opini wajar tanpa pengecualian, yang merupakan “opini yang dinyatakan oleh auditor ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan berlaku.”

### 2. Opini dengan modifikasian

“Auditor harus memodifikasi opininya dalam laporan auditor berdasarkan SA 705 (Revisi 2021) ketika auditor menyimpulkan bahwa, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material, atau tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material.” ([www.iapi.or.id](http://www.iapi.or.id))

Terdapat empat tipe opini audit modifikasian, yaitu:

a. Paragraf Penekanan Suatu Hal

“Ketika pengungkapan atas kepatuhan terhadap kerangka pelaporan keuangan lain tidak menyesatkan, tetapi menurut auditor pengungkapan tersebut sedemikian penting bahwa pengungkapan tersebut adalah fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan, suatu paragraf Penekanan suatu Hal ditambahkan dalam opini auditor berdasarkan SA 706 (Revisi 2021), untuk menarik perhatian pengguna laporan keuangan pada pengungkapan tersebut.”

b. Opini Wajar Dengan Pengecualian

“Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregat, adalah material, tetapi tidak pervasif, terhadap laporan keuangan, atau auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika relevan, dapat bersifat material, tetapi tidak pervasif.”

c. Opini Tidak Wajar

“Auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar ketika auditor, setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregat, adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan.”

d. Opini Tidak Menyatakan Pendapat

“Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini, dan auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan dampak kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi terhadap laporan keuangan, jika relevan, dapat bersifat material dan pervasif. Auditor tidak boleh menyatakan pendapat ketika, dalam kondisi yang sangat jarang yang melibatkan banyak ketidakpastian, auditor menyimpulkan bahwa, meskipun telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang setiap ketidakpastian tersebut, auditor tidak dapat merumuskan suatu opini atas laporan keuangan karena interaksi

yang potensial dari ketidakpastian tersebut dan kemungkinan dampak kumulatif dari ketidakpastian tersebut terhadap laporan keuangan.”

Menurut Standar Audit (SA) 705 2021 ([www.iapi.or.id](http://www.iapi.or.id)), pervasif merupakan istilah yang menggambarkan dampak atau kemungkinan dampak dari kesalahan penyajian terhadap laporan keuangan, yang tidak dapat dideteksi karena bukti audit yang cukup dan tepat tidak mampu diperoleh auditor.

Untuk dapat mendapatkan laporan keuangan auditan serta opini audit, terdapat beberapa tahapan audit laporan keuangan menurut Mohamadi (2022), yakni:

1. Penerimaan perikatan audit, dimana terjadi kesepakatan yang disetujui bersama oleh pihak auditor dan perusahaan. Bentuk dari perikatan ini tertulis sebagai surat perikatan audit.
2. Perencanaan proses audit, dimana dalam tahapan ini, auditor akan:
  - a. Melakukan pemahaman atas bisnis dan industri klien
  - b. Melakukan prosedur analitik
  - c. Menentukan tingkat materialitas, menetapkan risiko audit dan risiko bawaan
  - d. Melakukan pemahaman pada stuktur pengendalian internal dan menetapkan risiko pengendalian
  - e. Mengembangkan rencana dan program audit atas klien
3. Pelaksanaan pengujian audit, dimana pada tahap ini auditor akan melakukan pengujian analitik, pengujian pengendalian untuk melihat efektifitas *internal control* klien, serta melakukan pengujian substantif yang bertujuan untuk menemukan kesalahan penyajian yang berdampak pada laporan keuangan.
4. Pelaporan audit, dimana pada tahap ini auditor akan melaporkan hasil auditnya kepada klien dalam bentuk laporan audit. Laporan audit sendiri berisi tanggung jawab auditor, jenis opini yang diberikan, jasa yang diberikan, objek dan ruang lingkup audit, tujuan audit, serta hasil dan rekomendasi yang diberikan jika terdapat pos-pos yang perlu diperbaiki.

Untuk melihat bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, auditor melakukan beberapa jenis pengujian Arens et al. (2020), yakni:

- 1) “*Risk assessment procedures*, dilakukan untuk menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan. Kunci utama dari pengujian ini adalah auditor harus memiliki pemahaman terhadap perusahaan klien, termasuk pengendalian internal (*internal control*) nya”.
- 2) “*Tests of controls*, dimana auditor menilai risiko pengendalian terhadap transaksi yang berhubungan dengan tujuan audit. Untuk dapat memperoleh bukti yang tepat untuk mendukung penilaian risiko pengendalian, auditor melaksanakan pengujian pengendalian atau *tests of controls*”.
- 3) “*Substantive tests of transactions*” “Pengujian ini dilakukan untuk menguji salah saji moneter yang secara langsung dapat memengaruhi kebenaran dari laporan keuangan. Terdapat 3 tipe *substantive tests*, yaitu *substantive tests of transactions* (pengujian substantif atas transaksi), *substantive analytical procedures* (prosedur analitis substantif), and *tests of details of balances* (pengujian atas rincian saldo)”.
- 4) “*Substantive analytical procedures*, dimana pengujian ini mencakup perbandingan jumlah yang tercatat dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor. Terdapat dua tujuan dari pengujian ini dalam melakukan audit terhadap saldo suatu akun, yaitu menunjukkan adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan dan memberikan bukti substantif”.
- 5) “*Tests of details of balances*, dimana pengujian ini memfokuskan pada saldo akhir pada balance sheet (laporan posisi keuangan) dan laporan laba rugi. Hal utama yang ditekankan pada jenis pengujian ini adalah rincian saldo yang berada di laporan posisi keuangan, seperti konfirmasi saldo pelanggan untuk akun piutang, pemeriksaan fisik terhadap persediaan, dan pemeriksaan saldo utang usaha. Pengujian saldo akhir ini sangat penting karena bukti ini diperoleh dari sumber yang independen dari klien, maka dari itu dianggap dapat diandalkan”.

Selain itu, auditor juga memerlukan bukti audit untuk menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan auditor, yakni pemberian opini audit atas laporan keuangan klien. Menurut Arens et al. (2020), terdapat 8 jenis bukti audit, yakni:

- 1) *Physical examination*, dilakukan untuk memastikan bahwa suatu aset benar-benar ada, seperti *cash opname* dan *stock opname*.
- 2) *Confirmation*, merupakan penjelasan langsung dari pihak ketiga terkait keakuratan informasi yang diminta auditor. Terdiri dari 2 jenis, yaitu *positive confirmation* (memastikan saldo sudah benar atau tidak) dan *negative confirmation* (hanya dijawab jika terjadi ketidakcocokan).
- 3) *Inspection*, merupakan pemeriksaan dokumen dan catatan oleh auditor untuk mendukung informasi dalam laporan keuangan, seperti *vouching*.
- 4) *Analytical Procedures*, berupa evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan antara data keuangan dan non keuangan.
- 5) *Inquiries of the client* berupa pemberian informasi baik secara lisan maupun tulisan oleh klien terkait pernyataan auditor.
- 6) *Recalculation*, berupa pengecekan perhitungan klien yang telah dibuat untuk melihat keakuratan pencatatan dan prosedur klien.
- 7) *Reperformance*, berupa pengujian ulang atas prosedur *internal control* klien, misalnya melakukan perbandingan faktur dengan harga yang telah disepakati.
- 8) *Observation*, berupa melihat secara langsung prosedur yang dilakukan klien, misalnya melihat langsung *internal control* klien dalam menyimpan *inventory*.

Terdapat 4 jenis risiko audit yang akan ditemukan jika melakukan *audit risk model* Arens et al. (2020), yakni

- 1) *Planned detection risk*, berupa “risiko bahwa bukti audit untuk tujuan audit akan gagal untuk mendeteksi salah saji yang melebihi materialitas kinerja atau *performance materiality*”.
- 2) *Inherent risk*, dimana “auditor menilai kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material, sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal klien. Jika auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan salah saji

yang tinggi ada, maka auditor akan menyimpulkan bahwa risikonya tinggi”.

- 3) *Control risk*, yang merupakan “penilaian auditor atas risiko bahwa salah saji material dapat terjadi dalam suatu asersi dan tidak dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal klien”.
- 4) *Acceptable risk* ukuran seberapa auditor bersedia menerima bahwa laporan keuangan mungkin terdapat salah saji material setelah proses audit selesai dan opini tanpa modifikasi telah dikeluarkan”.

Opini audit menurut Pangestuti et al. (2020) dihitung dengan variabel *dummy*, dengan arti:

Kode 1: mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian

Kode 0: mendapatkan opini audit selain wajar tanpa pengecualian

## **2.9 Pengaruh Opini Audit Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

“Teori kepatuhan menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki opini audit yang baik akan lebih cepat dan patuh dalam menyampaikan laporan keuangannya karena hal tersebut merupakan informasi yang baik bagi para investor” (Videsia et al., 2022). Menurut Risanty et al. (2023), “perusahaan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*) maka perusahaan akan tepat waktu dalam pelaporan keuangan, sedangkan perusahaan yang mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian akan menunda atau memperlambat dalam pelaporan keuangan”. Perusahaan yang tidak menerima opini wajar tanpa pengecualian cenderung tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya dan memiliki *audit delay* yang lebih lama, karena proses audit akan melibatkan negosiasi dengan klien serta konsultasi dengan partner audit yang lebih senior (Videsia et al., 2022).

Secara pasial, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Risanty et al. (2023) dan Videsia et al. (2022), variabel opini audit memberikan pengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Secara simultan, penelitian yang dilakukan oleh Risanty et al. (2023) menunjukkan bahwa variabel

ukuran perusahaan, financial distress, dan opini audit berpengaruh secara simultan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Videsia et al. (2022) yang menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan opini audit secara simultan berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat dibentuk hipotesis alternatif penelitian mengenai pengaruh opini audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

Ha<sub>3</sub>: Opini audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

## **2.10 Current Ratio**

“Rasio likuiditas mengukur kemampuan jangka pendek perusahaan untuk dapat membayar kewajiban yang jatuh tempo dan untuk memenuhi kebutuhan kas yang tidak terduga.” (Weygandt et al., 2019). “Tingkat likuiditas yang tinggi pada sebuah perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sedangkan tingkat likuiditas yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik (Diliasmara & Nadirsyah, 2019).

Menurut Weygandt et al. (2019), terdapat 4 jenis rasio yang dapat digunakan untuk mengukur likuiditas, yaitu:

### 1. *Current ratio* / rasio lancar

“Rasio lancar adalah pengukuran yang banyak digunakan untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek. Rasio *CR* dihitung dengan membagi aset lancar dengan kewajiban lancar.”

### 2. *Acid-test ratio* / *quick ratio* / rasio cepat

“Rasio cepat / *quick ratio* merupakan pengukuran likuiditas jangka pendek langsung perusahaan. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah kas, investasi jangka pendek, dan akun bersih piutang dengan kewajiban lancar.”

3. *Accounts receivable turnover* / perputaran piutang

“Rasio perputaran piutang merupakan rasio untuk menilai likuiditas perusahaan melalui piutang. Rasio ini mengukur berapa kali, rata-rata, perusahaan menagih piutang selama periode tersebut. *A/R turnover* dihitung dengan membagi penjualan kredit bersih (penjualan bersih dikurangi penjualan tunai) dengan rata-rata piutang bersih.

4. *Inventory turnover* / perputaran persediaan.”

“Perputaran persediaan mengukur berapa kali, rata-rata, persediaan dijual selama satu periode. Tujuannya adalah untuk mengukur likuiditas persediaan. Persediaan perputaran dihitung dengan membagi harga pokok penjualan dengan persediaan rata-rata.”

Berikut merupakan rumus dari *Current Ratio* menurut Weygandt et al. (2019), yaitu:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aset lancar}}{\text{kewajiban lancar}} \quad (2.3)$$

Komponen pertama dari *Current Ratio* adalah aset lancar. Menurut Kieso et al. (2020), “aset lancar adalah uang tunai dan aset lain yang diharapkan dapat dikonversi oleh perusahaan menjadi uang tunai, menjual, atau mengkonsumsi baik dalam satu tahun atau dalam siklus operasi, mana saja lebih lama”.

Terdapat beberapa komponen dari aset lancar menurut Kieso et al. (2020), yakni:

1. Persediaan (*inventory*), yang dinyatakan sebesar biaya perolehannya atau melalui metode *net realizable value*, mana yang lebih rendah. Biaya tersebut terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi dan biaya-biaya lain yang terjadi saat membawa persediaan ke lokasi dan kondisinya sekarang, setelah dikurangi penyisihan yang dapat diatribusikan pada persediaan. HPP



persediaan dapat dihitung menggunakan metode *FIFO* (*First in first out*) ataupun *average*.

2. Piutang (*receivables*), dimana perusahaan harus dengan jelas mengidentifikasi kerugian yang diantisipasi terkait piutang tak tertagih, baik itu piutang usaha, non-trading, maupun setiap piutang yang digunakan sebagai jaminan. Piutang yang jumlahnya besar dan berpengaruh harus ditampilkan dalam laporan posisi keuangan dan *notes* terkait. Di sisi lain, piutang yang timbul karena transaksi yang tidak biasa, (seperti penjualan properti, atau pinjaman kepada karyawan), perusahaan harus mengklasifikasikannya sebagai aset jangka panjang, kecuali jika penagihannya berada dalam jangka waktu 1 tahun.
3. Beban dibayar dimuka (*prepaid expenses*), dimana perusahaan akan memasukkan biaya dibayar dimuka kedalam aset lancar jika perusahaan akan menerima manfaat dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi, mana yang lebih lama. Dalam hal ini, perusahaan melaporkan jumlah beban dibayar dimuka sebesar jumlah yang masih tersisa atau belum habis manfaatnya.
4. Investasi jangka pendek (*short-term investments*), dimana perusahaan akan melaporkan investasi sekuritas yang bersifat *trading* (bentuk utang maupun ekuitas) sebagai investasi jangka pendek. Di sisi lain, investasi yang bersifat *held for collection* dapat diklasifikasikan sebagai *current* maupun *non-current asset*, tergantung keadannya. Dalam hal ini, semua investasi sekuritas yang bersifat *trading* ditunjukkan sebesar nilai wajarnya.
5. Kas (*Cash*), dimana kas pada umumnya terdiri dari mata uang dan giro. Di sisi lain, setara kas merupakan investasi jangka pendek yang bersifat sangat likuid, yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang. Itu sebabnya, beberapa perusahaan menamakan akun kas sebagai “kas dan setara kas”, dan akan menunjukkan akun ini sebesar nilai wajarnya.

Komponen kedua dari *Current Ratio* adalah kewajiban lancar. “Kewajiban lancar adalah kewajiban yang umumnya diharapkan perusahaan untuk diselesaikan secara

normal dalam satu siklus operasi atau satu tahun, mana yang lebih lama” (Kieso et al., 2022). Kieso et al. (2020) membagi *current liabilities* menjadi beberapa komponen, yakni:

1. “Hutang yang timbul dari perolehan barang dan jasa, seperti hutang usaha, gaji dan upah terutang, pajak penghasilan terutang, dan sebagainya.”
2. “Tagihan yang diterima di muka untuk penyerahan barang atau pelaksanaan jasa, seperti pendapatan sewa yang diterima di muka atau pendapatan langganan yang diterima di muka.”
3. “Liabilitas lain yang likuidasinya akan dilakukan dalam satu siklus operasi atau satu tahun, seperti porsi obligasi jangka panjang yang harus dibayar pada periode berjalan, kewajiban jangka pendek timbul dari pembelian peralatan, atau taksiran kewajiban, seperti kewajiban garansi.”

### **2.11 Pengaruh *Current Ratio* Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan**

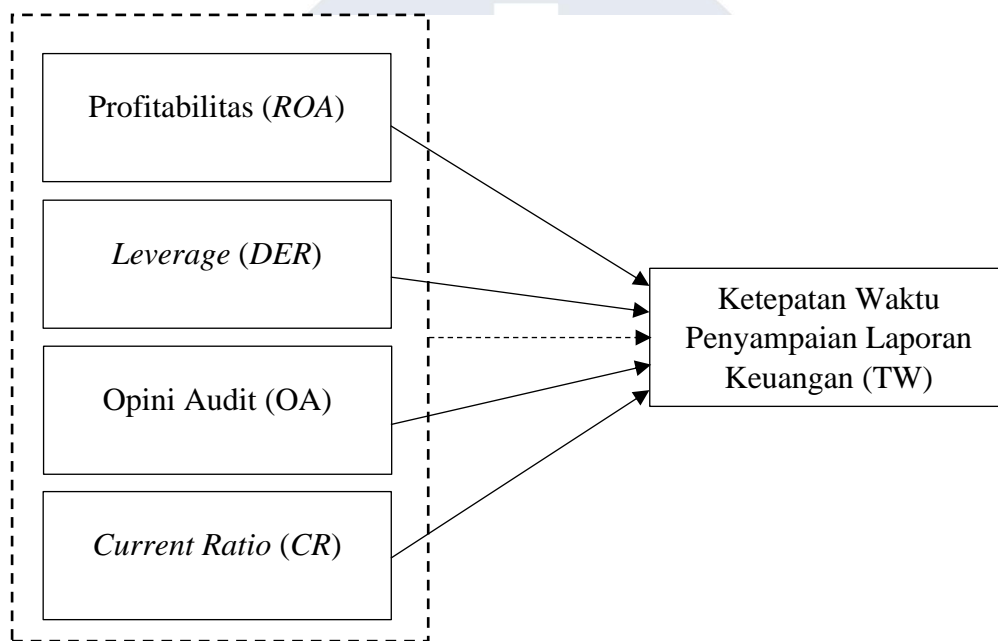
“Likuiditas ialah posisi kas ataupun uang sebuah perusahaan serta kemampuannya guna melakukan pemenuhan kewajiban dalam membayar utang secara tepat waktu” Rahmawati dan Khoiriawati (2022). Menurut (Carolina & Tobing (2019), “likuiditas biasanya juga dinamakan sebagai *short term liquidity*. Untuk penelitian yang diteliti, likuiditas dihitung dengan memanfaatkan *Current Ratio (CR)* yang mencerminkan kapabilitas perusahaan membayar utang berjangka pendek menggunakan aset lancar, atau banyaknya aset lancar ada untuk penutupan setiap rupiah utang jangka pendek”. Menurut Aqsa et al. (2020), perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan melunasi kewajiban jangka pendeknya yang tinggi dan cenderung tepat waktu dalam melaporkan laporan keuangannya.

Secara parsial, hasil penelitian yang dilakukan oleh Aqsa et al. (2020), Parhusip dan Pasaribu (2022), dan Rahmawati dan Khoiriawati (2022) menunjukkan bahwa *current ratio* berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan

sebelumnya, maka dapat dibentuk hipotesis alternatif penelitian mengenai pengaruh opini audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

Ha4: *Current ratio* berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

### 2.12 Model Penelitian



Gambar 2. 1 Model Penelitian

